BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 13 /K.BE-03/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 006/K.BE/HM.00/III/2020 Perihal Instruksi Pembentukan PPID

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Kedua : Struktur, tugas dan wewenang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berhak :
a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan
b. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Keempat : PPID Bawaslu Kabupaten Berkewajiban :
a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA ,

TITIN SUMARNI, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Nomor : 13 /K.BE-03/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

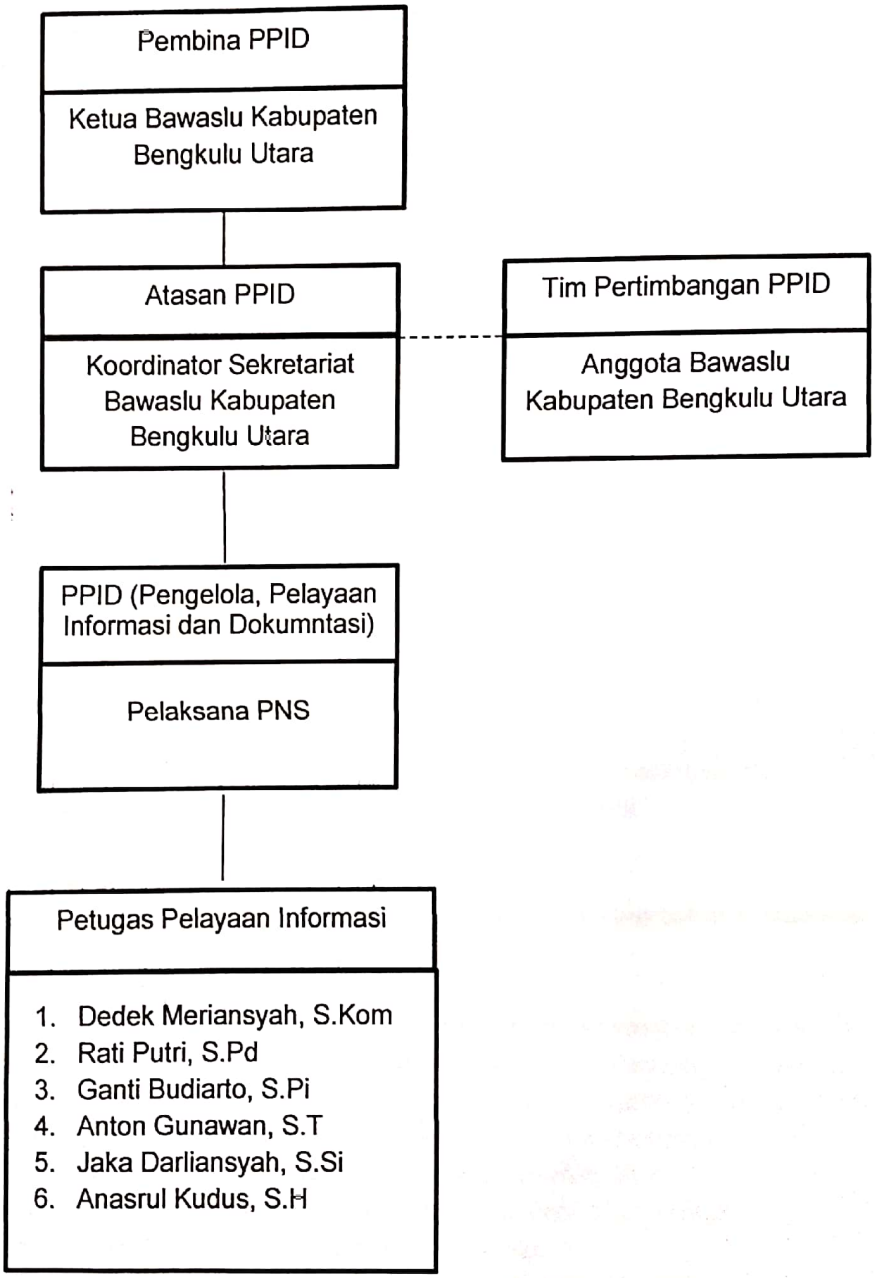

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Nomor : 13 /K.BE-03/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. TUGAS

1. Pembina dan Pengarah PPID

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Infomasi; dan
d. Menindaklanjuti rekomendai perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

a. Kebujakan pengelolaann dan pelayanan informasi publik;
b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
d. Penyusunan daftar informasi;
e. Penyusunan laporan layanan; dan
f. Penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna menungkatkan kualitas layanan informasi publik;
c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. Pengelola, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Menyusun prosedur operasional standat yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
c. Menyediakan, mengumumkan dan.atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
d. Membuat dan mengumumkan laporan leyanan sesuai dengan oerarutan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019, serta menyamaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di ligkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan sistem Iformasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinanya kepada komisi informasi.

5. Petugas pelayanan informasi

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
   1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
   2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

Dipindai dengan CamScanner

3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat didang dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

B. WEWENANG

a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian konsekuensi;
c. Menolak pernimtaan informasi publik secara tertulis jika informasi ublik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Meminta salinan Dokumentasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

Dipindai dengan CamScanner